

KOPERTIS BERUBAH JADI L2 DIKTI

Penghapusan Dikotomi Sembuhkan PTS 'Sakit'

JAKARTA (KR) - Penghapusan dikotomi antara Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), salah satunya untuk membina PTS yang sakit atau bermasalah. Penghapusan dikotomi tersebut berpengaruh besar pada perlakuan terhadap PTN dan PTS, sehingga tidak ada kesenjangan lagi antara PTN dan PTS, baik di kalangan masyarakat maupun pemerintah.

Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Pusat Prof Dr Edy Suandi Hamid MEd mengemukakan hal itu di Jakarta, Kamis (8/1) terkait penghapusan Kopertis menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) yang antara lain juga bertujuan menghilangkan dikotomi PTN dan PTS.

Menurut Edy kekecewaan PTS sebenarnya sudah lama. "Sudahlah jangan kita bahas lagi soal kesenjangan ini. Hal ini kan sudah terjadi sejak lama. Makanya kita terus berjuang," ujarnya.

Rencana penghapusan dikotomi ini tentu saja sangat menggembirakan. Dia menyambut baik rencana ini dan optimis akan meningkatkan kualitas pendidikan di PTS. "Itu bagus, paling tidak kita sudah mematuhi Undang Undang No 12 Tahun 2012 tentang Persamaan PTN dan PTS," ucapnya.

Kondisi ini akan menyembuhkan PTS yang 'sakit' menurut kriteria Dikti, sehingga mutunya makin menanjak. Selama ini, PTS yang memiliki kualitas rendah atau sakit sering dianaktirikan. "Kalau tidak sehat kan harus dibina dan disehatkan. Jangan didiamkan saja, kita bisa melakukan penguatan," ungkapnya.

Para pengelola PTS di DIY tidak mempersoalkan perubahan Kopertis menjadi L2 Dikti. Selain sesuai perintah UU No 12 Tahun 2012, juga memberikan kemudahan bagi PTS, tidak hanya terkait urusan rumah tangga PTS, dana hibah penelitian, Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED), tapi sampai pengurusan kepankatan. "Sebelum ada L2 Dikti, untuk mengurus beberapa hal itu kami harus ke Jakarta. Tapi dengan adanya L2 Dikti bisa dilakukan di DIY," kata Rektor Universitas PGRI Yogyakarta Prof Dr Buchory MS.

Buchory mengatakan, L2 Dikti tidak hanya memberikan layanan bagi PTS tapi juga PTN. Hal itu secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas PT, karena PTN dan PTS akan berusaha menjadi yang terbaik. "Meski L2 Dikti juga menangani PTN, sebaiknya untuk dana hibah PTS tetap bersaing dengan PTS. Kalau PTS harus bersaing dengan PTN, selain kurang tepat juga akan mengalami beberapa kendala," ujar Buchory.

Hal senada dikemukakan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Drs Santoso MM. Menurut Santoso, L2 Dikti semakin mendekatkan layanan kepada

PTS. Kendati demikian, sebagai pengelola PTS tetap ada kekhawatiran, apakah sumber daya manusia di lembaga baru tersebut bisa bersinergi dengan baik.

"Saya berharap L2 Dikti benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas, sehingga berbagai persoalan yang selama ini dihadapi PTS bisa diselesaikan dengan baik, termasuk kesenjangan PTN-PTS bisa ditekan," tambahnya.

Menurut Wakil Rektor II Universitas Widya Mataram (Unwima) Kelik Indro Suryono SH MEd, sebenarnya keberadaan Kopertis masih dibutuhkan. Seharusnya dipertahankan dan diberi kemudahan dalam membina PTS. Sebab pembinaan PTS berbeda dengan PTN. PTS segalanya usaha sendiri, sedangkan PTN semuanya dari negara.

Terhadap pendirian L2 Dikti, Kelik berharap orang yang duduk di lembaga itu jangan hanya orang pemerintahan, namun perlu melibatkan orang PTS atau paling tidak dosen DPK yang bertugas di PTS, sehingga mengetahui seluk beluk PTS dan segala persoalannya dan tidak membeda-bedakan antara PTN dan PTS.

Sedangkan Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerja Sama Universitas Kristen Imanuel (Ukrim) Yogya Bastaman Saragih DIng berharap L2 Dikti bisa menjadi penghubung ke pemerintah, khususnya untuk kemajuan pendidikan. Orang yang duduk di lembaga itu harus bisa bersikap sebagai abdi. "Kondisi PTS berbeda dengan PTN, ini yang harus diingat," katanya. (Ati/Ria/War)-c